

Pelaksanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko Inspektorat terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Tana Tidung

Implementation of the Inspectorate's Risk-Based Internal Supervision of Regional Financial Management in Tana Tidung Regency

Pebryanto Abdi Putra¹✉, Syahran²

¹Universitas Borneo Tarakan, Indonesia.

²Universitas Borneo Tarakan, Indonesia.

✉Corresponding author: pebryanto08@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam pengelolaan keuangan daerah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, observasi, Focus Group Discussion, dan analisis dokumen, melibatkan individu dengan pengalaman kerja antara 5 hingga 20 tahun. Objek penelitian ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Tidung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan intern berbasis risiko telah dilaksanakan dengan efektif, meskipun terdapat kendala terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, teknologi, dan budaya organisasi yang masih menghambat optimalisasi penerapannya. Penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan pendekatan berbasis risiko yang lebih terintegrasi, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel di masa depan.

Abstract

This study aims to assess the implementation of risk-based internal supervision by the Regional Inspectorate of Tana Tidung Regency in managing regional finances. A qualitative research method was employed, utilizing data collection techniques such as structured interviews, observation, Focus Group Discussions, and document analysis, involving participants with 5 to 20 years of work experience. The research focuses on the Regional Inspectorate of Tana Tidung Regency. The findings indicate that risk-based internal control has been implemented effectively, though challenges such as limited competent human resources, technology, and organizational culture still impede its full optimization. The study highlights the importance of capacity building through training and the utilization of technology to enhance the effectiveness of supervision. A more integrated risk-based approach is expected to lead to greater transparency and accountability in regional financial management moving forward.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2025 Pebryanto Abdi Putra, Syahran.

Article history

Received 2025-04-10

Accepted 2025-06-30

Published 2025-07-11

Kata kunci

Pengawasan Intern
Berbasis Risiko;
Sumber Daya Manusia;
Keterbatasan
Teknologi;
Budaya.

Keywords

*Risk-Based Internal
Control;
Human Resources,
Technology Limitations;
Culture.*

1. Pendahuluan

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola urusan di wilayahnya, mencakup pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur, lingkungan, serta pelayanan sosial. Peran ini menjadikan pemerintah daerah kunci dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik di tingkat kabupaten. Keberhasilan pembangunan serta efektivitas layanan publik sangat bergantung pada pengelolaan keuangan daerah yang tepat dan akuntabel (Mardiasmo, 2018). Inspektorat Daerah memiliki posisi strategis sebagai lembaga pengawasan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berlangsung dengan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pengawasan internal berbasis risiko yang diterapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pada praktiknya, sering kali terdapat kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan (*das sollen*) dan kenyataan yang terjadi di lapangan (*das sein*). Idealnya, pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah seharusnya bersifat proaktif dan fokus pada area dengan risiko tinggi untuk mengurangi potensi penyimpangan (Kusyanuarto. K & Akbar. R, 2023). Namun, pada kenyataannya, sistem pengawasan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP. Secara praktis, pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah sering kali menghadapi keterbatasan seperti sumber daya manusia, keterampilan, serta dukungan teknologi yang memadai. Hal ini mengakibatkan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak efektif dalam mengidentifikasi potensi risiko serta mencegah terjadinya penyelewengan anggaran. Selain itu, pengetahuan mengenai teknik dan metode pengawasan intern berbasis risiko belum sepenuhnya dipahami oleh paraauditor ditingkat daerah, sehingga pendekatan pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat reaktif. Kasus penyalahgunaan anggaran diberbagai daerah baru terungkap setelah audit dilakukan, menunjukkan bahwa pengawasan yang ada lebih mengedepankan deteksi daripada pencegahan risiko (Budiarjo, 2019).

Berdasarkan regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, Inspektorat Kabupaten Tana Tidung memiliki peran yang krusial dalam mendukung kinerja Bupati sebagai Kepala Daerah. Hasil pemeriksaan pada Pemerintah Kota/Kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Utara seperti Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan, penyimpangan keuangan daerah yang dikelola terjadi dan ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tersebut cenderung memiliki nilai penyimpangan yang lebih tinggi dari kedua pemerintah daerah tersebut, dengan data perbandingan untuk periode lima tahun disajikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah dan Nilai Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2019 s.d. 2023

Tahun Anggaran	Kalimantan Utara		Bulungan		Tana Tidung	
	Jumlah	Temuan Pemeriksaan	Jumlah	Temuan Pemeriksaan	Jumlah	Temuan Pemeriksaan
2019	217	3.307.322.757,31	117	2.058.133.437,13	171	10.747.007.455,50
2020	194	4.810.651.283,36	133	12.005.778.383,28	126	7.960.746.263,33
2021	287	10.523.299.682,35	147	5.488.355.832,36	119	5.572.522.384,33
2022	130	3.908.654.167,73	103	4.459.289.113,79	139	8.756.820.889,66
2023	254	7.516.642.630,25	187	10.290.667.185,67	102	6.766.634.323,83
Jumlah	1082	30.066.570.521,00	687	34.302.223.952,24	657	39.803.731.316,65

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. 2023, (Hasil olah data).

Tabel diatas menunjukkan bahwa meskipun APBD yang dikelola oleh Pemkab. Tana Tidung lebih rendah dibandingkan APBD yang dikelola oleh Pemkab. Kalimantan Utara dan Pemkab. Bulungan, namun ketidaktaatan dan ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah yang terjadi pada Pemkab. Tana Tidung dalam kurun waktu tahun anggaran 2019 s.d. 2023 cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kedua pemerintah daerah tersebut. Hal tersebut mengindikasikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada Pemkab. Tana Tidung belum sepenuhnya memenuhi tata kelola yang baik dan berkesan bahwa pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Tidung terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dikelola masih belum optimal dan efektif, sehingga ketidaktaatan dan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah cenderung tinggi.

Inspektorat Kabupaten Tana Tidung tiap tahun telah melaksanakan pengawasan intern berbasis risiko dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan melalui pemeriksaan/audit, reviu, monitoring, dan evaluasi. Hasil dari pengawasan ini dirangkum dalam Laporan Hasil Pengawasan yang mencakup temuan serta rekomendasi atau saran yang harus ditindaklanjuti oleh OPD sebagai objek pemeriksaan. Namun, tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut masih tergolong rendah, karena tidak semua temuan dan rekomendasi berhasil ditindaklanjuti. Akibatnya, hasil pemeriksaan belum memberikan manfaat yang optimal dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, secara keseluruhan dapat diamati pada Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 s.d. 2023

Tahun Anggaran	Temuan Kerugian Daerah		Selesai Tindak Lanjut Kerugian Daerah		
	Jumlah	Temuan Pemeriksaan	Jumlah	Temuan Pemeriksaan	%
2019	123	957.333.430,44	79	158.430.911,65	16,55%
2020	203	2.419.369.206,78	119	1.453.361.611,52	60,07%
2021	109	1.927.132.128,46	58	1.002.968.739,30	52,04%
2022	253	1.639.527.267,64	130	192.599.482,03	11,75%
2023	37	93.862.596,57	33	89.332.662,82	95,17%
Jumlah	725	7.037.224.629,89	687	2.896.693.407,32	41,16%

Sumber: Rekapitulasi Data Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Tidung, (Hasil olah data).

Tabel 2 diketahui bahwa belum seluruh temuan pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Tidung telah ditindaklanjuti oleh OPD selaku obyek pemeriksaan. Secara keseluruhan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pemulihan kerugian keuangan daerah tersebut dari tahun 2019 s.d. 2023 hanya mencapai 41,16%. Tingkat penyelesaian tindak lanjut tersebut setiap tahunnya fluktuatif dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut tertinggi hanya sebesar 95,17% yaitu atas pemeriksaan tahun 2023. Sedangkan tingkat penyelesaian tindak lanjut terendah yaitu sebesar 11,75% yaitu atas temuan pemeriksaan tahun 2022. Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Tidung belum sepenuhnya berhasil dalam menjalankan pengawasan intern berbasis risiko terhadap pengelolaan keuangan daerah. Padahal, peran konsultatif Inspektorat, khususnya untuk mendorong OPD dalam memperbaiki dan menyelesaikan masalah yang ditemukan dari hasil pengawasan, sangat penting. Kegagalan dalam menyelesaikan tindak lanjut ini meningkatkan risiko bahwa masalah yang sama dalam tata kelola keuangan daerah akan terus muncul atau berulang, sehingga tujuan dari pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat tersebut tidak tercapai.

Berdasarkan kondisi diatas dan rumusan pasal-pasal mengenai pengelolaan keuangan daerah, maka rumusan penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko di Kabupaten Tana Tidung, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Kajian ini penting untuk

mengidentifikasi sejauh mana pendekatan ini telah diterapkan, tantangan apa saja yang dihadapi, dan bagaimana solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratori (*exploratory approach*). Satori dan Komariah (2013), menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui wawancara terseteruktur, Observasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Penelitian ini lebih difokuskan terhadap peran Inspektorat pada pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung, karena Inspektorat merupakan *leader SPIP* di kabupaten serta memiliki andil yang sangat besar dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif. Metode analisis data yang digunakan peneliti yaitu *Content Analysis* (analisis isi).

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis dilakukan berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 13 informan terpilih. Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, serta auditor, dengan pengalaman kerja antara 5 hingga 20 tahun.

3.1. Interpretasi Hasil

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan individu terkait pengawasan intern berbasis risiko masih sangat terbatas. Pelatihan yang diberikan hanya sebatas pengenalan mengenai pengawasan berbasis risiko, sementara beberapa auditor bahkan belum mendapatkan pelatihan sama sekali mengenai hal ini. Sebagai gantinya, mereka mencari informasi dari regulasi yang ada dan berdiskusi dengan auditor senior. Hal ini terbukti dari data registrasi diklat yang menunjukkan bahwa tidak ada auditor di Inspektorat Kabupaten Tana Tidung yang memiliki sertifikat pengembangan terkait pengawasan intern berbasis risiko. Meskipun ada pelatihan yang berhubungan dengan pengawasan berbasis data, seperti pelatihan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi, pelatihan ini belum mencakup aspek teknis pelaksanaan.

Dalam hal implementasi pengawasan intern berbasis risiko, Inspektorat Kabupaten Tana Tidung telah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko. PKPT ini disusun dengan merujuk pada risk register yang dibuat oleh masing-masing OPD, yang berisi hasil identifikasi dan penilaian risiko terhadap tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan tiap perangkat daerah, yang seharusnya sudah berdasarkan proses bisnis masing-masing. Berdasarkan PKPT berbasis risiko, area dengan risiko tinggi akan menjadi prioritas untuk dilakukan pengawasan dengan sampling menggunakan metode yang tepat, serta alokasi anggaran, waktu, dan jumlah auditor yang efisien. Namun, dalam praktiknya, perencanaan ini sering kali tidak sejalan dengan kondisi di lapangan, yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Beberapa faktor penghambatnya seperti pemenuhan SDM auditor yang akan ditugaskan dalam pengawasan kurang, karena jadwal penugasan yang tumpang tindih sehingga biasanya pengawasan tetap dilaksanakan dengan menambah waktu penugasan kemudian yaitu kompetensi SDM auditor maupun pejabat struktural yang ditugaskan belum mengetahui teknis yang mendalam terkait dengan pengawasan berbasis risiko sehingga fokus dalam penugasan pemeriksaan menjadi bias yang berimbang pada ketidaktepatan temuan hasil audit, pemberian rekomendasi serta tindaklanjut rekomendasi.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan penerapan pengawasan intern berbasis risiko di Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan melalui pengawasan berdasarkan PKPT berbasis risiko yang telah disusun yang memberikan fokus yang lebih besar pada area dengan potensi risiko tinggi. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk mendeteksi potensi masalah secara lebih dini, sehingga mengurangi dampak yang mungkin terjadi pada kinerja organisasi.

Namun, penerapan pengawasan intern berbasis risiko ini belum sepenuhnya optimal, sebagian besar pejabat dan auditor tidak memahami secara mendalam apa yang menjadi fokus utama dalam

pengawasan intern berbasis risiko. Kebanyakan dari mereka hanya memahami pengawasan intern berbasis risiko seperti pengawasan regular yang hanya berfokus pada besaran dan banyaknya hasil temuan audit tetapi tidak memberikan masukan-masukan yang mempunyai nilai tambah bagi audit yang diperiksa. Selain itu, pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko yang dilaksanakan tidak terlebih dahulu memahami proses bisnis dari perangkat daerah yang dilakukan pengawasan sehingga ruang lingkup pemeriksaan menjadi meluas dan tidak fokus pada risiko-risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya oleh perangkat daerah.

Belum optimalnya pengawasan intern berbasis risiko pada inspektorat daerah Kabupaten Tana Tidung juga terlihat dari rendahnya tindaklanjut dari temuan hasil audit yang tuangkan dalam Laporan hasil pemeriksaan (LHP). Rendahnya tindaklanjut ini dikarenakan kemungkinan rekomendasi yang diberikan kurang tepat sasaran atau kurang jelas. Terlihat dari data dari bagian perencanaan program dan keuangan. Secara keseluruhan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pemulihan kerugian keuangan daerah tersebut dari tahun 2019 s.d. 2023 hanya mencapai 41,16%. Rendahnya tindaklanjut tersebut juga telah dilaporkan oleh BPKP RI kepada inspektorat daerah Kabupaten Tana Tidung melalui ringkasan *Area of Improvement* (AoI) dari Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat Kabupaten Tana Tidung lebih lanjut BPKP merekomendasikan untuk melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil asuransi atas AoI yang belum ditindaklanjuti dan Mendorong *stakeholders* untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan atas Assurance atas GRC.

Budaya organisasi yang cenderung administratif juga berperan dalam memperlambat implementasi pengawasan berbasis risiko. Banyak pegawai yang belum terbiasa dengan pendekatan yang lebih strategis, sehingga terjadi resistensi terhadap perubahan. *Pendekatan administratif masih sangat kuat, sulit untuk memperkenalkan pendekatan strategis yang berbasis risiko seperti ini tanpa perubahan budaya yang signifikan.* Hal ini menunjukkan perlunya transformasi budaya organisasi untuk mendukung keberhasilan pengawasan berbasis risiko (Prasetyono & Nugraha, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan meskipun pengawasan intern berbasis risiko telah diterapkan, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Pendekatan ini berhasil meningkatkan fokus pada area berisiko tinggi, namun keterbatasan SDM dan teknologi membuat hasil pengawasan kurang maksimal. Penekanan pada analisis risiko terbukti membantu mendeteksi masalah lebih dini, namun perlu didukung oleh pelatihan yang lebih intensif dan sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi. *Pengawasan berbasis risiko ini sangat membantu memastikan organisasi tetap berjalan sesuai aturan dan bisa deteksi masalah lebih cepat dan cegah dampak buruk yang lebih besar.*

Kurangnya optimalisasi penerapan pengawasan intern berbasis risiko di Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Tidung disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang tidak berpengaruh terhadap penilaian yang diperoleh oleh inspektorat tersebut. Beberapa pencapaian yang telah diraih meliputi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Penyajian Laporan Keuangan dari BPK RI selama periode 2019 hingga 2023, tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP) Level 3 dari BPKP RI pada tahun 2022 dan 2023, serta Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 dari BPKP RI pada tahun 2022 hingga 2024.

Kendati demikian, pencapaian ini tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian, kemungkinan disebabkan oleh beberapa indikator penilaian yang tidak langsung berkaitan. Sebagai contoh, pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI berfokus pada kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta Peraturan Bupati yang mengatur Sistem dan Prosedur Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung. Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi oleh BPKP RI lebih berfokus pada pemenuhan dokumen perencanaan, proses, dan pencapaian kinerja yang terkait dengan pengelolaan risiko. Sementara itu, Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang berhubungan dengan kapasitas dan kapabilitas SDM auditor dinilai dari pengelolaan sumber daya manusia, termasuk keikutsertaan auditor dalam diklat pengembangan kompetensi. Namun, penilaian ini mencakup seluruh jenis diklat teknis yang dilaksanakan oleh BPKP RI dan BPK RI, sehingga tidak ada pengusulan khusus untuk diklat teknis terkait pengawasan intern berbasis risiko.

3.2. Keterkaitan dengan Teori dan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini sangat relevan dengan teori manajemen risiko yang menekankan pentingnya identifikasi dan mitigasi risiko dalam mendukung tata kelola organisasi. ISO 31000, sebagai standar internasional untuk manajemen risiko, menyoroti bahwa pengawasan intern berbasis risiko harus mengintegrasikan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko untuk memastikan pengelolaan yang efektif. Penelitian ini, penerapan konsep tersebut terlihat dari upaya Inspektorat daerah Kabupaten Tana Tidung dalam memprioritaskan area berisiko tinggi.

Penelitian ini juga sejalan dengan studi Suparmi (2019), yang menekankan pentingnya teknologi sebagai pendukung utama dalam implementasi pengawasan berbasis risiko. Suparmi mengungkapkan, tanpa dukungan teknologi yang memadai, proses analisis risiko menjadi lambat dan kurang akurat. Konteks penelitian ini, informan menyebutkan bahwa keterbatasan teknologi sering kali menjadi hambatan utama dalam menganalisis risiko secara efisien. Hal ini menunjukkan perlunya investasi dalam pengembangan sistem berbasis teknologi untuk mendukung pengawasan.

Rustandi (2022), mengungkapkan keberhasilan pengawasan berbasis risiko sangat bergantung pada budaya organisasi yang adaptif. Penelitian ini, budaya administratif yang masih dominan di Inspektorat daerah Kabupaten Tana Tidung menjadi tantangan besar. Pegawai yang terbiasa dengan pola kerja konvensional sering kali sulit menerima pendekatan yang lebih strategis.

Inspektur daerah menambahkan:

"Budaya kerja kami masih terlalu administratif, sehingga pendekatan berbasis risiko ini belum sepenuhnya diterima."

Hal ini mendukung pandangan Rustandi bahwa perubahan budaya organisasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi.

Selain itu, penelitian ini memperkuat temuan dari Kusuma (2020), menyatakan pelatihan dan pengembangan kapasitas auditor adalah elemen penting dalam pengawasan berbasis risiko. Tanpa pelatihan yang cukup, auditor cenderung kesulitan dalam mengaplikasikan teknik analisis risiko secara efektif. Dalam wawancara, beberapa informan mengungkapkan perlunya pelatihan lanjutan untuk memahami metode ini secara mendalam. Sebagaimana dinyatakan oleh

Auditor pertama pada Irban II:

"Pelatihan yang kami terima masih sangat mendasar, sehingga kemampuan kami untuk menerapkan pengawasan berbasis risiko belum optimal."

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mendukung teori dan penelitian terdahulu, sekaligus memberikan kontribusi baru terkait implementasi pengawasan intern berbasis risiko dalam konteks pemerintahan daerah. Hasil ini menunjukkan integrasi antara teori manajemen risiko, dukungan teknologi, dan perubahan budaya organisasi menjadi prasyarat utama untuk keberhasilan pengawasan intern berbasis risiko yang efektif.

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori manajemen risiko yang menyatakan pengawasan yang efektif harus difokuskan pada area dengan tingkat risiko tinggi. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Suparmi (2019), yang menegaskan pentingnya penggunaan teknologi sebagai pendukung dalam pengawasan berbasis risiko. Rustandi (2022) lebih lanjut menyoroti bahwa keberhasilan implementasi metode ini sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi yang adaptif. Pada konteks Kabupaten Tana Tidung, budaya administratif yang masih dominan menjadi tantangan utama yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko di Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Tidung menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan fokus pengawasan pada area dengan risiko tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratori. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang lebih strategis, memungkinkan deteksi dini terhadap potensi masalah, dan memastikan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Namun, implementasi yang optimal masih terkendala oleh sejumlah hambatan signifikan.

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu penghalang utama. Banyak auditor yang belum memiliki kompetensi teknis mendalam dalam menganalisis risiko, sehingga efektivitas

pengawasan intern berbasis risiko belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, minimnya pelatihan lanjutan dan kesenjangan dalam pemahaman konsep antara auditor juga menghambat penerapan metode ini. Diperlukan pelatihan intensif yang mampu mengatasi kesenjangan kompetensi ini.

Permasalahan terkait keterbatasan teknologi menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Pengawasan yang masih dilakukan secara manual tidak hanya membutuhkan waktu yang lebih lama, tetapi juga berpotensi meningkatkan tingkat kesalahan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pengembangan dan penerapan sistem berbasis teknologi sangat diperlukan untuk mempercepat proses analisis risiko serta meningkatkan keakuratan dalam pengawasan. Teknologi modern memiliki potensi untuk mendukung auditor dalam pengelolaan data dan pelaksanaan evaluasi risiko secara lebih efisien dan efektif.

Budaya organisasi yang cenderung administratif masih menjadi salah satu tantangan utama. Implementasi pendekatan strategis, seperti pengawasan berbasis risiko, membutuhkan transformasi budaya kerja yang lebih adaptif dan proaktif. Penelitian ini menegaskan pentingnya upaya sosialisasi dan perubahan pola pikir dalam organisasi untuk mendukung keberhasilan implementasi metode tersebut. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih terintegrasi, pengawasan intern berbasis risiko memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan tanggung jawab serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Implementasi pengawasan intern berbasis risiko di Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Tidung menunjukkan capaian positif dalam mengidentifikasi area dengan tingkat risiko tinggi. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, teknologi, dan budaya organisasi masih menjadi hambatan signifikan dalam optimalisasi penerapannya. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan pendekatan berbasis risiko yang lebih terintegrasi, pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, T. (2019). Pengawasan Keuangan Daerah: Antara Deteksi dan Pencegahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 123-135
- Kusuma, A. (2020). Peran Pelatihan dalam Meningkatkan Kapasitas Auditor untuk Pengawasan Berbasis Risiko. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 78-89.
- Kusyanuarto, K., Akbar, R. (2023). Evaluasi Peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Studi pada Inspektorat Kabupaten Paser Kalimantan Timur). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 12(1), 45-60.
- Mardiasmo. (2018). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi. ISBN 978-979-29-7056-2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP.
- Prasetyono, A., & Nugraha, D. (2023). Pengaruh Budaya Peduli Risiko Dalam Meningkatkan Efektivitas Manajemen Risiko Organisasi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(4), 982-991
- Rustandi. (2022). Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Keberhasilan Pengawasan Berbasis Risiko. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 4(2), 134-142.
- Satori, D., & Komariah, A. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Suparmi. (2019). Peran Teknologi Informasi dalam Mendukung Audit Berbasis Risiko di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 45-60.